



Dana Desa

Pencairan ke Rekening Desa Tunggu Tahap Klarifikasi

Tabanan (Bali Post)-

Meski tahun ini dana desa telah dicairkan oleh pemerintah pusat untuk 636 desa dinas di Provinsi Bali, namun tak serta merta langsung masuk ke rekening aparatur pemerintahan desa. Di Tabanan sendiri, yang mendapatkan alokasi tertinggi yakni Rp 37,06 miliar untuk 133 desa, belum bisa diamprah (masuk ke rekening desa, red). Pasalnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) masih melakukan tahap klarifikasi dan evaluasi APBDes.

"Kami sedang tahap klarifikasi dan evaluasi APBDes. Jika dalam proses klarifikasi tersebut ada yang mesti diperbaiki, kami beri waktu tiga hari

untuk memperbaikinya. Artinya, usai tahapan klarifikasi dan evaluasi minggu depan sudah bisa ngamprah anggaran," beber Kepala BPMPD Tabanan Gusti Ngurah Supanji, Jumat (19/6) kemarin.

Mantan Kadis DKP Tabanan ini juga menyampaikan, jika tahapan ini sudah sepenuhnya rampung maka dana tersebut sudah bisa dipindahbukukan dari rekening daerah ke rekening desa. "Target kami Juni ini sudah bisa dipindahbukukan. Jadi desa yang APBDesnya sudah siap maka dana tersebut bisa keluar duluan," ujarnya.

Disinggung tentang nominal dana yang masuk di masing-masing desa, Supanji mengatakan jumlahnya beda-

beda. Dikatakannya, ada enam sumber dana yakni bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan bersifat khusus kabupaten dan provinsi dan dana desa pusat. "Dana yang digelontorkan sesuai dengan rencana kegiatan yang teranggarkan di APBDes," ucapnya.

Bahkan, gaji perbekel yang selama ini sempat ngadat dipastikan akan segera dibayarkan jika dana tersebut sudah masuk ke rekening desa. "Dalam APBDes tersebut juga tertuang pengeluaran untuk gaji perbekel," imbuhnya.

Terkait kecemasan mengelola dana yang cukup besar di tengah SDM yang dikhawatirkan belum siap menerima tanggung jawab besar, Supanji optimis jika aparatur pemerin-

tahan desa bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. "Kami telah berkali-kali mengadakan bimtek, jadi luangkan waktu jangan ditinggal. Dan hasil bimtek sampaikan di staf jangan disimpan sendiri," sarannya.

Disinggung tentang dana pendamping seperti yang diharapkan Camat Kediri belum lama ini, Supanji mengatakan bahwa Kementerian Desa sudah meluncurkan dana pendampingan khususnya terhadap pelaksanaan dana desa. "Tapi sampai sekarang kami belum dapat petunjuk lebih lanjut tentang pendampingan. Sepertinya pendampingan akan merujuk ke sistem PNPM yang lalu," ujarnya. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 20 Juni 2015

Hal : 19



Bali Post Sabtu Kliwon, 20 Juni 2015

Dugaan Korupsi di Undiksha

Jaksa Periksa 30 Saksi, Tersangka Bisa Bertambah

Denpasar (Bali Post) -

Pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi atau *mark-up* pengadaan tanah Gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK), Gelanggang Olahraga (GOR) dan asrama mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, masih terus berlanjut. Hingga Jumat (19/6) kemarin, sudah ada sekitar 30 saksi yang diperiksa. Mereka adalah dosen, pejabat dan mantan pejabat Undiksha, pejabat Pemkab Buleleng, panitia, pihak bank, kepala desa, pemilik lahan, makelar dan sejumlah saksi lainnya.

Dari pemeriksaan 30 saksi itu, besar kemungkinan bahwa tersangkanya akan bertambah dan tidak berhenti pada dua nama, yakni inisial IWS dan NM. "Ya, kita masih mengembangkan perkara Undiksha ini. Hingga saat ini, tersangkanya baru dua. Ini bukan berhenti sampai di sini, karena kita masih terus kembangkan dan periksa saksi-saksi," ucap tim penyidik, Wayan Suardi ketika mendampingi Kasipenkum Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Ashari Kurniawan, Jumat kemarin.

Lantas, sejauh mana perkembangan kasus ini? Pihak kejaksaan menjelas-

kan, bahwa saat ini penyidik sedang memeriksa berkas hasil penyidikan perkara dua tersangka, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk bahan audit BPKP. "Ini sebagai bahan audit sambil kita lakukan pemberkasan dua tersangka tadi," katanya.

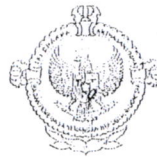
Sebagaimana diketahui, kasus *mark-up* ini cukup heboh dibicarakan di masyarakat. Selain ramai diperbincangkan terkait dugaan keterlibatan "bos-bos" Undiksha, pejabat asal Bali juga sering dikaitkan dengan perkara ini. Bahkan, pihak kejaksaan sudah mendengar hal tersebut. Dalam perkara

ini, Kejati Bali akhirnya menetapkan tersangka atas dugaan *mark-up* pengadaan tanah gedung FOK, dan GOR Undiksha. Kedua orang yang telah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka adalah ketua panitia tim pengadaan tanah dan satu lagi pihak makelar yang berstatus PNS. "Ada dua tersangka. Mereka berinisial IWS dan NM," sebut Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, beberapa waktu yang lalu.

Dia mengatakan, setelah mengonfirmasi ke Aspidsus Kejati Bali, kedua orang tersebut dinyatakan cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan, untuk memperjelas dan mempertegas dari pokok persoalan tanah seluas 15 hektar itu, penyidik Kejati Bali yang terdiri dari Wayan Suardi, Akmal Kodrat dan Gede Arthana, akan terus mengembangkan kasus ini. Bahkan, NM sudah sempat diperiksa kembali terkait kasus ini. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 20 Juni 2015

Hal : 3



Kasus Dugaan Deposito Fiktif

Pasca-Dirut, Giliran CS dan "Teller" BPD Bali Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

Pengembangan kasus dugaan korupsi dengan modus *fraud* yakni deposito fiktif hingga mencapai Rp 1,7 miliar, terus dikembangkan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Setelah memeriksa Dirut BPD Bali, penyidik juga memeriksa CS dan *teller* bank tersebut. "Ya, mereka sudah diperiksa untuk mencari alur dari kasus ini," sebut sumber kejaksaan, Jumat (19/6) kemarin.

Disebutkannya, pemeriksaan berikutnya pada Selasa (22/6) mendatang. Hal itu dibenarkan Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, bahwa memang ada pemeriksaan lanjutan atas kasus korupsi di BPD Bali. "Ya memang benar, namun secara detail saya belum dapat data," ungkap Ashari.

Sebelumnya diberitakan, berkas kasus dugaan korupsi dengan modus *fraud* dipastikan belum rampung. Penyidik Kejati Bali sudah memanggil dan memeriksa kembali dua saksi yang merupakan pentolan di satu-satunya bank milik pemerintah daerah Bali itu. Mereka adalah Dirut Bank BPD Bali Made Sudja dan mantan Plt. BPD Cabang Tabanan 2013-2014, Wayan Suartika.

Kala itu, Ashari Kurniawan menambahkan, keduanya diperiksa jaksa yang berbeda. Dirut BPD diperiksa oleh jaksa Fitrah, sedangkan Suartika diperiksa jaksa Suardi. Khusus untuk dirut, yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah diperiksa. Hanya saja saat ditanya soal materi pemeriksaan kembali, Ashari enggan menjelaskan dengan dalih bahwa itu kewenangan penyidik. "Jangan soal materi. Intinya Dirut BPD Bali diperiksa untuk melengkapi alat bukti," tegasnya. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 20 Juni 2015

Hal : 3



Ranperda BUMD

Aset PDDS akan Likuidasi

Tabanan (Bali Post) -

Perkembangan pembentukan BUMD baru dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai pengganti Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS) sampai saat ini belum memperlihatkan titik terang. Namun, dari keterangan Bapeda Tabanan, ranperda BUMD yang baru sudah diserahkan ke Kabag Hukum dan HAM Setda Tabanan untuk proses masuk Prolegda. Kekayaan atau aset PDDS rencananya dilikuidasi dan selanjutnya menjadi aset BUMD yang baru.

"Ranperda sudah kami serahkan ke bagian Hukum dan HAM Setda Tabanan tanggal 8 Juni 2015. Selanjutnya akan diserahkan ke DPRD Tabanan untuk pembahasan lebih lanjut," ujar Kepala Bapeda Tabanan IB Wiratmaja. Menurutnya pembentukan BUMD didasarkan atas

Perda. Draf Perda diakuinya sudah beberapa kali dibahas antara tim Mahasaraswati dengan Pemda Tabanan. Dalam pembahasan terakhir terdapat sejumlah kesepakatan di antaranya kekayaan PDDS akan dilikuidasi dan selanjutnya menjadi aset BUMD yang baru. "Likuidasi dilaksanakan oleh Pemda sebagai pemilik, dan ketentuan tersebut diatur dengan Perbup," ucapnya.

Sementara kesepakatan lainnya yakni tentang modalan yang juga diatur sesuai draf perda serta link antara BUMDes dan BUMD akan diatur dalam AD/ART.

Wiratmaja menambahkan, 50 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga sudah diluncurkan pertengahan bulan Maret lalu. Bahkan sebagai persiapan lebih lanjut juga sudah dilaksanakan pelatihan manajemen bagi calon pen-

gelola BUMDes, survei dan identifikasi terhadap produk-produk yang akan dihasilkan, termasuk jumlah kelompok binaan yang bisa dibentuk setiap desa BUMDes. "Bulan ini akan dilakukan rekrutmen kelembagaan BUMDes yang akan dilakukan dengan *fit and proper test* bekerja sama dengan lembaga independen di bawah koordinasi pihak Unmas Denpasar," ujarnya.

Ide dasar untuk melikuidasi BUMD PDDS dilatarbelakangi adanya kajian akademik terhadap Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS). Selama 44 tahun perjalanan PDDS tanpa arah yang jelas. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PDDS, Pemda melakukan pembaharuan sistem dengan mendirikan BUMD baru untuk menyelesaikan permasalahan BUMD yang lama. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 20 Juni 2015

Hal : 19